

PEMERINTAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN



**LAPORAN
AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH
(LAKIP) TAHUN 2017**

**DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN PADANG PARIAMAN**



Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman memiliki komitmen yang kuat untuk mewujudkan akuntabilitas kinerja dalam melaksanakan program dan kegiatan. Oleh karena itu, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Perhubungan diwajibkan membuat Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP) Tahun 2017.

Untuk mewujudkan akuntabilitas kinerja dituangkan dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP). LAKIP Disusun dengan berpedoman kepada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

A. GAMBARAN UMUM DINAS PERHUBUNGAN

Sesuai dengan Peraturan Bupati Padang Paraman no : 58 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Padang Pariaman. Dinas Perhubungan Kabupaten Padang Pariaman beralamat di Jalan Sudirman No : 187 Pariaman No Telepon (0751- 92255). Dinas Perhubungan mempunyai tugas pokok : Melaksanakan menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang Perhubungan.

Dinas Perhubungan merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan bidang perhubungan.

Dinas Perhubungan dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Dinas Perhubungan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang perhubungan dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

Dinas Perhubungan Kabupaten Padang menyelenggarakan fungsi :

- 1.penyusunan perencanaan bidang perhubungan.
- 2.perumusan kebijakan teknis dibidang perhubungan.
- 3.penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang perhubungan.
- 4.pembinaan dan pelaksanaan urusan dibidang perhubungan.
- 5.pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan/ atau pelaksana tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Visi dan Misi Dinas Perhubungan Kabupaten Padang Pariaman

Visi merupakan gambaran tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan instansi pemerintah. Visi juga merupakan suatu keadaan yang ingin diwujudkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pada akhir periode Renstra OPD sesuai dengan tugas fungsi OPD sejalan dengan pernyataan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam RPJMD.

Visi Dinas Perhubungan Tahun 2016 - 2021 dengan memperhatikan tugas pokok dan fungsi serta harapan-harapan (impian) yang ingin dicapai oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Padang Pariaman dengan rumusan visi sebagai berikut :

“ Terwujudnya Transportasi yang aman, nyaman ,tertib , ramah dan terjangkau “.

Untuk mewujudkan visi Dinas Perhubungan kabupaten Padang Pariaman, ditetapkan misi yang merupakan sesuatu yang harus dilaksanakan oleh instansi pemerintah sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan, misi juga merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan sesuai dengan tugas fungsi dalam rangka mewujudkan visi OPD, misi yang telah ditetapkan adalah :

Menciptakan Kinerja Lalu Lintas yang Aman, nyaman Tertib dan Lancar

Mewujudkan angkutan umum yang sesuai standar dan laik jalan

Mewujudkan sarana dan prasarana transportasi sesuai peruntukannya

Terwujudnya tenaga teknis perhubungan yang handal melalui peningkatan SDM

TUGAS DAN FUNGSI

Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas melaksanakan kewenangan Daerah dalam bidang perhubungan yang meliputi perencanaan, pembangunan, pemeliharaan dan pengendalian bidang Lalu Lintas Angkutan Dan Perekeretaapian dan Bidang Keselamatan, Teknik, Sarana Dan Prasarana.

Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi :

- a.pembinaan, pengawasan dan pengendalian penyusunan kebijakan strategis dinas;
- b.perumusan kebijakan umum bidang perhubungan;
- c.pengendalian pelaksanaan urusan bidang perhubungan dalam rangka mencapai target kinerja dinas;
- d.pembinaan dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Perhubungan;
- e.pelaksanaan tugas pembantuan dari pemerintah pusat dan pemerintah provinsi;

-
- f.pembinaan dan pengendalian urusan kesekretariatan, kepegawaian dan rumah tangga Dinas;
 - g.pengawasan dan pengendalian pelaksanaan anggaran, administrasi keuangan dan aset;
 - h.koordinasi dan kerjasama dengan organisasi perangkat daerah, instansi dan lembaga lainnya serta unsur masyarakat; dan/ atau
 - i.pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Padang Pariaman terdiri dari :

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat terdiri dari :
 - 1). Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - 2). Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
3. Bidang LLAP (Lalu Lintas Angkutan dan Perkeretaapian)
4. Bidang KTSP (Keselamatan Transportasi Sarana Prasarana)

Dinas Perhubungan merupakan salah satu dari unit kerja yang ada dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Pariaman beralamat di Jalan Imam Sudirman No. 178 Pariaman dengan nomor telepon (0751) 92255. SOTK Dinas Perhubungan dengan Peraturan Daerah No. 10 Tahun 2016 tanggal 10 November 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Padang Pariaman.

Dinas Perhubungan mempunyai dua bidang teknis dan satu sekretariat. Bidang teknis terdiri dari Bidang Sarana dan Prasarana dan Bidang Lalu Lintas Angkutan dan Perkeretaapian . Dinas Perhubungan Kabupaten Padang Pariaman mempunyai sumber daya manusia sebanyak 67 pegawai yang terdiri dari 34 orang PNS dan 33 orang PTT. Daftar potensi kepegawaian Dinas perhubungan disajikan pada tabel berikut:

Tabel 1.
Jumlah Pegawai berdasarkan pendidikan dan Golongan
Dinas Perhubungan Kabupaten Padang Pariaman

No.	Klasifikasi		Jumlah
	Komposisi Menurut Golongan		
I.	1.	Golongan IV	04
	2.	Golongan III	12
	3.	Golongan II	18
		Jumlah	34
II.	Komposisi Menurut Tingkat Pendidikan		
	1.	Sarjana S2	02
	2.	Sarjana S1	08
	3.	Sarjana Muda / D3	01
	4.	SLTA	23
JUMLAH			34

B. PERMASALAHAN UTAMA (*STRATEGIC ISSUED*) DINAS PERHUBUNGAN .

Permasalahan Dinas Perhubungan dalam menjalankan fungsinya dapat diuraikan sebagai berikut :

Didalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan menghadapi permasalahan dan hambatan antara lain :

1. Belum memadainya ketersediaan fasilitas penunjang dalam optimalisasi pemanfaatan sarana dan prasarana transportasi
2. Tingginya tingkat fatalitas korban kecelakaan lalu lintas jalan
3. Tingginya tingkat penggunaan kendaraan pribadi mengakibatkan penggunaan ruang jalan tidak efektif dan efisien sehingga mengakibatkan kemacetan lalu lintas.
4. Masih Rendahnya disiplin dalam berlalu lintas.
5. Belum optimalnya pemenuhan standar keselamatan dan keamanan transportasi meliputi kecukupan dan kehandalan sarana prasarana /fasilitas lalu lintas untuk keselamatan dan keamanan transportasi.
6. Dalam aspek pelayanan angkutan antara lain belum optimalnya pemenuhan standar pelayanan sarana dan prasarana transportasi.
7. Minimnya kesadaran dan peran serta masyarakat akan keselamatan dan keamanan transportasi;
8. Belum optimalnya pengawasan dan penegakan hukum dalam pemenuhan standar keselamatan dan keamanan transportasi
9. Minimnya kualitas dan kuantitas SDM Transportasi sesuai kompetensi standar keselamatan

dan keamanan transportasi.

10. Belum terintegrasinya data kecelakaan yang dapat digunakan untuk peningkatan keselamatan jalan
11. Belum optimalnya penanganan perlintasan sebidang jalur KA dengan jalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan
12. Masih kurangnya sumberdaya Manusia baik kualitas maupun kuantitas dibandingkan dengan beban kerja yang dilaksanakan Dinas Perhubungan
13. Fasilitas perlengkapan jalan belum sesuai dengan kebutuhannya , disebabkan belum adanya data base dan pemetaan lokasi yang tepat. Seperti : Fasilitas perlengkapan jalan/ rambu, Halte, Trotoar, Penerangan Jalan Umum, Terminal
14. Belum Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana transportasi yang mampu menunjang keselamatan serta kelancaran transportasi.
15. Kendaraan angkutan umum seperti angkot di Padang Pariaman , masih 50% yang mengurus Keur. Sehingga angkutan umum tersebut masih banyak yang tidak laik jalan, dan telah banyak yang kurang baik, trayek tidak jelas, terminal tidak mendukung,
16. Belum tersedianya SOP (Standar Operasional Prosedure) yang jelas.

C. SISTEMATIKA PELAPORAN

Sistematika Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2017, sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Menginformasikan Gambaran Umum Dinas Perhubungan Tahun 2017, menguraikan Permasalahan Utama (*Strategic Issued*) Dinas Perhubungan.

Bab II Perencanaan Kinerja

Menguraikan ringkasan/ikhtisar Perjanjian Kinerja Dinas Perhubungan Tahun 2017

Bab III Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja Dinas Perhubungan

Menyajikan capaian kinerja Dinas Perhubungan Tahun 2017. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Dinas Perhubungan sesuai dengan hasil pengukuran kinerja Dinas Perhubungan . Pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

- 1) Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;

-
- 2) Membandingkan antara target dan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
 - 3) Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
 - 4) Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
 - 5) Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
 - 6) Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
 - 7) Analisis Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja;

B. Realisasi Anggaran

Diuraikan realisasi anggaran yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja Dinas Perhubungan sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

Bab IV Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah dimasa mendatang yang akan dilakukan Dinas Perhubungan untuk meningkatkan kinerjanya.

Lampiran :

- 1) Perjanjian Kinerja
- 2) Lain-lain yang dianggap perlu

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Dinas Perhubungan Kabupaten Padang Pariaman berupaya mengimplementasikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2016-2021 Melalui Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan 2016-2021 dengan komitmen yang kuat. Implementasi Renstra Dinas Perhubungan pada tahun 2017 merupakan tahun kedua dari periode Renstra Dinas Perhubungan.

Untuk mencapai kinerja Dinas Perhubungan tahun 2017, Dinas Perhubungan Kab. Padang Pariaman menyusun Perencanaan Kinerja Tahun 2017, dan menetapkan Perjanjian Kinerja Dinas Perhubungan Tahun 2017. Target-target kinerja Dishub Tahun 2017 telah menggambarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2017.

Berikut ini terdapat penjelasan ringkas mengenai Perencanaan Kinerja dan Perjanjian Kinerja Dinas Perhubungan Kab. Padang Pariaman Tahun 2017

A. RENCANA STRATEGIS .

Visi Dinas Perhubungan Tahun 2016 - 2021 dengan memperhatikan tugas pokok dan fungsi serta harapan-harapan (impian) yang ingin dicapai oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Padang Pariaman dengan rumusan visi sebagai berikut :

“Terwujudnya transportasi yang aman, nyaman, tertib, ramah dan terjangkau”

Adapun penjelasan dari visi dapat dijelaskan sebagai berikut :

- | | | |
|-------------|---|--|
| Aman | : | Bebas dari segala sesuatu yang mengakibatkan bahaya dalam ruang lingkup besar ataupun kecil. |
| Nyaman | : | Suatu keadaan sudah terpenuhinya kebutuhan dasar manusia yaitu kebutuhan akan ketentraman(suatu kepuasan yang meningkatkan penampilan sehari-hari. |
| Lancar | : | Segala sesuatu yang tidak menghalangi aktivitas dan tidak terhambat guna mencapai suatu tujuan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. |
| Ramah | : | Baik hati dan menarik budi bahasanya dalam segi hal apapun yang menyangkut tentang ruang lingkup masyarakat seperti dalam kehidupan sehari-hari. |
| Tepat Waktu | : | Semua kegiatan bertujuan untuk mewujudkan tujuan. Prilaku tepat waktu adalah landasan pokok dalam merancang konsep serta gagasan dalam mewujudkan tujuan tersebut. |

Terjangkau : Sesuatu yang tidak terlalu sulit untuk mendapatkan hasil yang di inginkan untuk menghasilkan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Untuk mewujudkan visi Dinas Perhubungan kabupaten Padang Pariaman, ditetapkan misi yang merupakan sesuatu yang harus dilaksanakan oleh instansi pemerintah sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan, misi juga merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan sesuai dengan tugas fungsi dalam rangka mewujudkan visi OPD, misi yang telah ditetapkan adalah :

1. Menciptakan Kinerja Lalu Lintas yang aman , nyaman, tertib dan lancar.
2. Mewujudkan angkutan umum yang sesuai standart dan laik jalan .
3. Mewujudkan sarana dan prasarana transportasi sesuai peruntukannya.
4. Terwujudnya tenaga teknis perhubungan yang handal melalui peningkatan SDM.

Tujuan dan sasaran strategis Dinas Perhubungan Kabupaten
Padang Pariaman untuk tahun 2017
dapat diuraikan sebagai berikut :

Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
1	2	3	4	5
Menciptakan Kinerja Lalu Lintas yang Aman Tertib dan Lancar	Terciptanya kondisi lalu lintas yang aman, nyaman ,tertib dan lancar	Persentase penurunan waktu tempuh perjalanan	Meningkatnya keselamatan berlalu lintas.	Persentase penurunan angka kecelakaan
			Meningkatnya Kelancaran Lalu Lintas.	Kecepatan rata-rata kendaraan pada jalan utama di jam sibuk.
Mewujudkan angkutan umum yang sesuai standar dan laik jalan	Meningkatnya penggunaan angkutan umum	Rasio penggunaan angkutan umum dibandingkan kendaraan pribadi	Meningkatnya layanan angkutan umum yang berkualitas	Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan angkutan umum

Misi	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
				Indeks persepsi pengguna kendaraan pribadi terhadap pelayanan angkutan umum

B. RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2017

Guna mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi hasil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman, maka ditetapkan Peraturan Pemerintah Padang Pariaman tentang Perjanjian Kinerja dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Padang Pariaman tahun 2017 yang menjadi dasar Rencana Kerja Tahunan Pemerintah Padang Pariaman pada tahun 2017 termasuk Dinas Perhubungan Kabupaten Padang Pariaman. IKU didukung oleh 3 (tiga) Sasaran Strategis dengan 4 (empat) indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur keberhasilan program yang telah ditetapkan. Rencana Kinerja Tahunan Dinas Perhubungan Tahun 2017, adalah sebagai berikut :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
	INDIKATOR KINERJA UTAMA		
01	Meningkatnya keselamatan berlalu lintas	Persentase penurunan angka kecelakaan	6%
02	Meningkatnya kelancaran lalu lintas	Kecepatan rata-rata kendaraan pada jalan utama di jam sibuk	48 Km/ Jam
03	Meningkatnya layanan angkutan umum yang berkualitas	Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan angkutan umum	36%

		Indeks persepsi pengguna kendaraan pribadi terhadap pelayanan angkutan umum	39%
--	--	---	-----

C. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja yang merupakan komitmen kinerja antara Kepala OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman dengan Kepala Daerah Kabupaten Padang Pariaman berdasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Perjanjian Kinerja dan Indikator Kinerja Utama Dinas Perhubungan tahun 2017 beserta sasaran-sasaran strategis yang telah ditetapkan sebagai hasil (outcome) pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Perhubungan akan dijadikan acuan untuk mengukur kinerja yang dituangkan dalam Laporan Kinerja.

(Perjanjian kinerja terdapat dalam lampiran II.1).

Dinas Perhubungan Kabupaten Padang Pariaman telah merealisasikan berbagai target-target kinerja sesuai dengan penetapan dalam dokumen Perjanjian Kinerja. Berikut ini diuraikan mengenai capaian kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Padang Pariaman selama tahun 2017. Uraian tersebut dengan penjelasan yang memadai dan disertai dengan argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan.

A. CAPAIAN KINERJA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN PADANG PARIAMAN

Capaian kinerja Dinas Perhubungan Tahun 2017 dianalisis dan dievaluasi berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Capaian kinerja Dinas Perhubungan selama tahun 2017, adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1 Pengukuran dengan Skala Ordinal

Skala Ordinal (%)	Predikat/ Kategori
>100	Sangat Berhasil
$90 < s.d \leq 100$	Berhasil
$80 < s.d \leq 90$	Cukup Berhasil
$70 < s.d \leq 80$	Kurang Berhasil
≤ 70	Tidak Berhasil

Sumber : Permendagri 54 Tahun 2010 dan Keputusan Kepala LAN 293 Th. 2003, diolah

A. Capaian Kinerja DINAS PERHUBUNGAN

			Satuan	Realisasi	Tahun 2017	
--	--	--	--------	-----------	------------	--

No	SasaranStrategis	Indikator Kinerja		Tahun 2016	Target	Realisasi	%	Inter prestasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		INDIKATOR KINERJA UTAMA						
01.	Meningkatnya keselamatan berlalu lintas	Persentase penurunan angka kecelakaan	%	5	6	5	83	Cukup Berhasil
	Meningkatnya kelancaran lalu lintas	Kecepatan rata-rata kendaraan pada jalan utama di jam sibuk	Km/Jam	44	48	48	100	Sangat berhasil
02.	Meningkatnya layanan angkutan umum yang berkualitas	Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan angkutan umum	%	32	36	36	100	Sangat berhasil
		Indeks persepsi pengguna kendaraan pribadi terhadap pelayanan angkutan umum	%	37	39	39	100	Sangat berhasil

Analisis dan evaluasi capaian kinerja Dinas Perhubungan tahun 2017 :



Sasaran 1: Meningkatnya Keselamatan Berlalu Lintas

Sasaran 1 dari Dinas Perhubungan Kabupaten Padang Pariaman dalam mewujudkan misi ke III Dinas Perhubungan yaitu menciptakan kinerja Lalu Lintas Yang Aman Tertib dan Lancar, dengan indikator sasarnya yaitu menekan angka kecelakaan lalu lintas dalam wilayah Kabupaten Padang Pariaman. Berdasarkan Undang Undang Lalu Lintas nomor 22 Tahun 2009 yang dimaksud dengan Keselamatan Lalu lintas dan angkutan jalan adalah suatu keadaan terhindarnya setiap orang dari resiko kecelakaan selama berlalu lintas yang disebabkan oleh manusia, kendaraan, jalan dan atau lingkungan.

Dalam Usaha meningkatkan keselamatan berlalu lintas dibutuhkan sarana dan prasarana yang berkualitas dan lengkap antara lain :

1. Pemasangan Rambu Lalu Lintas merupakan bagian perlengkapan jalan yang berupa lambang, huruf, angka, kalimat, dan /atau perpenduan yang berfungsi sebagai peringatan, larangan, perintah, atau petunjuk bagi pengguna jalan.
2. Pemasangan Marka suatu tanda yang berada di permukaan jalan yang meliputi peralatan atau tanda yang membentuk garis membujur, garis melintang, garis serong, serta lambang yang berfungsi untuk mengarahkan arus lalu lintas dan membatasi daerah kepentingan lalu lintas.
3. Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL) merupakan perangkat elektronik yang bunyi untuk mengatur lalu lintas orang dan atau kendaraan di persimpangan atau pada ruas jalan.
4. Adapun program yang mendukung kegiatan kegiatan tersebut yaitu Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas. Dan Program Peningkatan Kelaikan Kendaraan Pengujian Kendaraan Bermotor.

Dalam Mencapai sasaran Meningkatkan Keselamatan Berlalu Lintas yang menjadi indikatornya antara lain : Menurunnya angka kecelakaan yang satuannya persentase.

No	SasaranStrategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya keselamatan berlalu lintas	Persentase penurunan angka kecelakaan	06%	05%	83%

1. Adapun Data kecelakaan lalu lintas tahun 2017 dari Laka Lantas kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Barat Resort Padang Pariaman, dari bulan Januari sampai Desember 2017 jumlah kecelakaan lalu lintas yang terjadi sebanyak 289 kecelakaan, dan yang menjadi korban mati ditempat sebanyak 42 orang dan luka berat sebanyak 107 orang serta yang

mengalami luka ringan sebanyak 424 orang, dengan kerugian materil sebesar Rp. 960.050.000,- (Sembilan ratus enam puluh juta Lima Puluh Ribu Rupiah).

2. Jika dibandingkan dengan kecelakaan tahun sebelumnya maka ada penurunan sebesar 06 Dari sumber data Polres Padang pariaman kecelakaan yang terjadi pada tahun 2016 banyaknya kecelakaan berjumlah 274 sedangkan tahun 2017 terjadi kecelakaan berjumlah 289 kecelakaan
- Tabel 2.1

Indikator Kinerja	Realisasi 2016	Capaian 2017		
		Target	Realisasi 2017	Persentase
Persentase Penurunan angka kecelakaan	5	6	5	83%

Persentase angka kecelakaan belum mencapai target yang diharapkan dibandingkan dengan pada tahun 2016, disebabkan oleh beberapa faktor yang menyebabkan kecelakaan di jalan raya antara lain :

1. Human Error (Kesalahan Manusia)

Faktor ini sering kali menjadi penyebab utama kecelakaan , hal ini disebabkan karena mengantuk, tidak tertib, pengemudi kehilangan konsentrasi (melakukan aktifitas lain sambil berkendara), mabuk alkohol/ obat obatan, kondisi psikis (stress, depresi dan lain sebagainya).

2. MechanicalnFailure (Kesalahan Teknis Kendaraan)

Faktor ini juga menjadi pemicu terjadinya kecelakaan disebabkan kurangnya pengetahuan si pengendara terhadap kondisi kesiapan kendaraan yang akan digunakan.

3. Faktor kondisi jalanan .

Faktor kondisi jalanan yang bergelombang, berlobang, rusak sangat membahayakan bagi pengguna jalan raya.

4. Faktor Kondisi cuaca / alam

Kondisi cuaca yang buruk bisa membuat jarak pandang berkurang, jarak pengereman jadi jauh, kondisi jalanan menjadi licin.

5. Kendaraan angkutan masih ada yang belum memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan.

Jumlah uji keur angkutan umum pada Dinas Perhubungan Kabupaten Padang Pariaman dalam hal ini berdasarkan Taman Kendaraan berjumlah : 2576 unit kendaraan . dengan rincian sebagai berikut : Bis, Mini Bus, Truk, Pick Up, Tangki, Box, Truk Gandeng dll

Uji keur kendaraan dengan masa berlaku selama 6 bulan dengan biaya Rp. 53.500,- sesuai dengan PERDA.Kabupaten Padang Pariaman nomor : 02 Tahun 2009 berlaku 1 April 2010. Untuk tahun 2017 kendaraan yang melaksanakan uji keur sebanyak 5.256 . serta proses uji keur bergantung pada jenis kendaraan bila diambil rata rata masing masing kendaraan membutuhkan waktu 20 menit / kendaraan . Adapun faktor terjadinya kecelakaan disebabkan oleh banyak faktor antara lain Jalan yang dilalui, manusia yang mengendarai, kendaraan yang layak, dan alam yang mendukung.

3. Jika dibandingkan dengan realisasi sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis Dinas Perhubungan;

Indikator Kinerja	Target	Realisasi 2017	%	2018	2019	2020	2021
Persentase penurunan angka kecelakaan	6	5	%	7%	4,5%	5%	5%

4.Membandingkan antara target dan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;

Indikator Kinerja	Capaian 2017			Capaian 2016			Capaian 2015		
	Target	Realisasi 2017	Persentase	Target	Realisasi 2016	Persentase	Target	Realisasi 2015	Persentase
Persentase penurunan angka kecelakaan	6	5	%	5	5	%	5	5	%

5. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);

6.Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;

Penyebab keberhasilan :

6.1 Komitmen dari seluruh petugas yang ada dilapangan.

6.2 Tersedian fasilitas perlengkapan jalan di daerah rawan kecelakaan.

6.3 Tersedianya tenaga pengawas/petugas di lapangan

Solusi yang telah dilakukan

Dilaksanakan sosialisasi dan penyuluhan penyuluhan pada sekolah sekolah dan masyarakat, agar bagi pengendara wajib berhati hati hati dalam mengendarai kendaraan . Menjaga kondisi fisik tubuh , dan memperhatikan kesiapan kendaraan .

7. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;

Berdasarkan analisis cara mengendalikan resiko kecelakaan di jalan raya antara lain

1. Biasakan berkendara berada di satu jalur, jangan berpindah pindah jalur.

2. Antisipasi pengemudi yang memiliki sikap suka berpindah jalur.

3. Jika ingin pindah jalur ikuti prosedur yang aman untuk berpindah.

4. Jangan Lawan arus.

5. Mengemudilah sesuai kondisi jalan raya dan kesehatan diri sendiri.

Analisis Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja;

Adapun yang mendukung program dan kegiatan :

1. Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas

2.1 Pengadaan rambu rambu lalu lintas

2.2 Pengadaan Marka Jalan

2.3 Pengadaan Marka Kejut

2.4 Pengadaan rambu rambu perlintasan sebidang kereta api

2.5 Pengadaan RPPJ (Rambu Pendahulu Penunjuk Jalan).

2. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan

2.1 Kegiatan uji kelayakan sarana transportasi guna keselamatan penumpang.

3. Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor

3.1 Pengendalian Pengujian Kendaraan Bermotor.



Sasaran 2:

Meningkatnya Kelancaran Lalu Lintas

Sasaran 2 dari Dinas Perhubungan Kabupaten Padang Pariaman dalam mewujudkan misi ke III Dinas Perhubungan yaitu menciptakan kinerja Lalu Lintas Yang Aman Tertib dan Lancar, dengan indikator sasarnya yaitu mengharapkan agar lalu lintas berjalan lancar dapat diketahui kecepatan rata-rata kendaraan pada jalan utama di jam sibuk pada titik lokasi tertentu. Pada Tahun 2017 ditargetkan rata rata kecepatan kendaraan pada jalan utama dijam sibuk sebesar 48 Km/ Jam .Berdasarkan Undang Undang Lalu Lintas nomor 22 Tahun 2009 yang dimaksud dengan :

1. Lalu lintas merupakan gerak Kendaraan dan orang di Ruang Lalu Lintas Jalan.
2. Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan Jalan merupakan keadaan berlalu lintas yang berlangsung secara teratur sesuai dengan hak dan kewajiban setiap Pengguna Jalan.
3. Kelancaran Lalu Lintas Angkutan Jalan merupakan keadaan berlalu lintas dan penggunaan angkutan yang bebas dari hambatan dan kemacetan di Jalan.
4. Ruang lalu lintas jalan adalah prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah kendaraan, orang dan/ atau barang yang berupa jalan dan fasilitas pendukung.

Dalam Usaha meningkatkan kelancaran lalu lintas diperlukan manajemen lalu lintas yang bertujuan untuk keselamatan , keamanan , ketertiban dan kelancaran lalu lintas dan dilakukan dengan peningkatan kapasitas jalan .

Dibutuhkan sarana dan prasarana yang berkualitas dan lengkap antara lain :

Pemasangan Rambu Lalu Lintas , Pemasangan Marka, Adanya RPPJ (Rambu Pendahulu Penunjuk Jurusan dan Petugas yang diturunkan pada titik titik rawan kemacetan dengan , Perlunya Sosialisasi dengan harapan dapat meningkatkan kelancaran lalu lintas.

Adapun program yang mendukung kegiatan kegiatan tersebut yaitu Program Peningkatan Pelayanan Angkutan , Program Pengendalian dan Pengamanan lalu lintas.

Dalam Mencapai sasaran Meningkatkan Kelancaran Berlalu Lintas yang menjadi indikatornya antara lain : Kecepatan rata rata kendaraan pada jalan utama di jam sibuk.

Dalam rangka meningkatnya kelancaran lalu lintas di Kabupaten Padang Pariaman ,Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman telah melakukan berbagai upaya selama tahun 2017. Upaya-upaya tersebut direalisasikan dalam berbagai program dan kegiatan Pada Dinas Perhubungan seperti : program peningkatan pelayanan angkutan , Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ dan Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan.

Indikator dan capaian kinerja dari sasaran ini dapat digambarkan sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Capaian 2017		
	Target	Realisasi	%
Kecepatan rata-rata kendaraan pada jalan utama di jam sibuk	48 %	48%	100

Keberhasilan sasaran tersebut di atas karena dukungan Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman dan berbagai pemangku kepentingan.

Kecepatan rata rata kendaraan pada jam utama di jam sibuk



1. Kecepatan rata rata kendaraan pada jam utama di jam sibuk 48 km / jam bila dibandingkan antara antara target dan realisasi kinerja tahun ini hasilnya 100%. Artinya target yang ditetapkan dapat terealisasi dengan baik.

Jika kita bandingkan antara target dan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;

Indikator Kinerja	Realisasi 2016	Capaian 2017		
		Target	Realisasi 2017	Persentase
Kecepatan rata rata kendaraan pada jalan utama di jam sibuk	44	48	48	100%

Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;

Indikator Kinerja	Target	Realisasi 2016	Km/Jam	2017	2018	2019	2020
Kecepatan rata rata kendaraan pada jalan utama di jam sibuk	40	40	Km/Jam	40	40	50	50

Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);

Pemerintah mempunyai tujuan untuk mewujudkan lalu lintas dan angkutan jalan yang selamat, aman, cepat, lancar, tertib dan teratur, nyaman dan efisien melalui manajemen dan rekayasa lalu lintas.

Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif
Adapun penyebab keberhasilan :

1. Eksis jalan yang memadai didukung dengan rambu rambu jalan.
2. Klasifikasi jalan yang baik , ditambah dengan pengawasan petugas di jalan

Penyebab kegagalan adalah:

1. Pertumbuhan pemilikan kendaraan pribadi yang tinggi yang digunakan di jalan membuat beban jaringan jalan menjadi makin berat. Angka kepemilikan kendaraan yang tinggi ini mengakibatkan permasalahan parkir.
2. jalan yang tidak memadai dan perlengkapan fasilitas jalan yang kurang.
3. Kurangnya pengawasan petugas di jalan

Solusi yang dilakukan :

1. Meningkatkan fasilitas perlengkapan jalan seperti rambu rambu , cermin tikung dll.
2. Menambah petugas di jalan jalan rawan titik kemacetan.

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;

Sumber daya manusia yang mendukung dalam pencapaian target tersebut masih rendah dan kurang berkompeten, sehingga perlu ditambah dengan pendidikan teknis. Pada Dinas Perhubungan ada 33 tenaga swakelola yang masih muda dan cakap dapat diberdayakan dalam mencapai kinerja dimaksud dalam mencapai tujuan dinas perhubungan.

Analisis Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja;

Program dan kegiatan untuk mendukung pencapaian indikator sasaran kecepatan rata rata kendaraan pada jalan utama di jam sibuk. Adapun dokumen pendukung dan data sebagai berikut : Pelaksanaan dengan sistem pendataan, survey aktifitas sarana angkutan yang bergerak dalam wilayah Kabupaten Padang Pariaman baik dilokasi titik pendataan maupun pada titik aktifitas angkutan , serta data yang tersedia .

Adapun program dan kegiatan yang mendukung adalah Program peningkatan pelayanan angkutan. Program rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ. Dan program pembangunan dan fasilitas perhubungan.

Analisis Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja;

Program dan kegiatan untuk mendukung pencapaian indikator sasaran kecepatan rata rata kendaraan pada jalan utama di jam sibuk. Adapun dokumen pendukung dan data sebagai berikut : Pelaksanaan dengan sistem pendataan, survey aktifitas sarana angkutan yang bergerak dalam wilayah Kabupaten Padang Pariaman baik dilokasi titik pendataan maupun pada titik aktifitas

angkutan , serta data yang tersedia .

Adapun program dan kegiatan yang mendukung adalah Program peningkatan pelayanan angkutan. Program rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ. Dan program pembangunan dan fasilitas perhubungan.



Sasaran 3:
Meningkatnya layanan angkutan umum yang berkualitas

Tingkat pertumbuhan kendaraan yang cukup tinggi, sementara lebar jalan nyaris tak berubah , membuat daerah kesulitas dalam mengakomodir pertumbuhan tersebut.

Indikator Sasaran 3

3.1 Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan angkutan umum



Target Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan angkutan umum tahun 2017 36% bilan dibandingkan dengan target 2016 sebesar 28% jadi ada peningkatan sebesar 8 persen. Target dan realisasi telah terpenuhi (sesuai dengan yang diharapkan).

Melaksanakan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan angkutan umum. Adapun angkutan umum diPadang Pariaman terdiri dari Angkutan udara , kereta api (Duku- Lubuk alung dan Lubuk Alung – Kurai taji serta lubuk alung Kayu tanam). Serta angkutan darat yaitu AKAP, AKDP dan angdes. Untuk Angkutan udara dan kereta api layanan angkutan umum di Padang Pariaman secara umum dapat dikatakan baik meskipun masih ada kekurangan, terutama angkutan pedesaan .

Membandingkan antara target dan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;

Indikator Kinerja	Realisasi 2016	Capaian 2017		
		Target	Realisasi 2017	Persentase
Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan angkutan umum	28	36	36	100%

Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;

Indikator Kinerja	Target	Realisasi 2017	%	2016	2018	2019	2020
Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan angkutan umum.	36	36	100	28	44	52	60

Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada); Adapun standar nasional sesuai SPM (Standar Pelayanan Minimal)

Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;

Analisis penyebab keberhasilan lalu lintas yang aman , tertib dan lancar antara lain:

1. Jadwal keberangkatan dan sampai tujuan tepat waktu
2. Harga normal dan terjangkau
3. Pelayanan yang baik dan prima
4. Angkutan yang bersih dan nyaman

Analisis penyebab kegagalan :

Solusi yang telah dilakukan

Menata ulang trayek angkot (angkutan umum) .

6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;

Sarana prasarana	Sumber daya Manusia	Sumber Dana
Alat tulis kantor Lap top/ computer Kend Operasional Jutnis/jutlak SPK (Kontrak) Perda, Perbup, SK	Tenaga Penguji Kendaraan Bermotor. Staf yang trampil dan berkompeten	APBD Kabupaten Padang Pariaman .

7. Analisis Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja;

Adapun yang mendukung program :

1. Program rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ
2. Program Pengendalian dan Pengamanan lalu lintas
3. Program Peningkatan Pelayanan angkutan

dan kegiatan :

1. Pengadaan Rambu rambu
2. Pengadaan Marka
3. Pengadaan Portal
4. Pengadaan Rambu perlintasan sebidang
5. Pengadaan Guadrail
6. Pengendalian Disiplin pengoperasian angkutan umum di jalan raya
7. Sosialisasi /penyuluhan ketertiban lalu lintas dan angkutan
8. Pemilihan dan pemberian penghargaan sopir/ juru mudi/awak kendaraan angkutan umum teladan.

-
9. Koordinasi dalam peningkatan pelayanan angkutan
 10. Monitoring, evaluasi dan pelaporan
 11. Pemeliharaan terminal
 12. Pemeliharaan rambu rambu

Analisis Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja;

Adapun yang mendukung program :

1. Program rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ
2. Program Pengendalian dan Pengamanan lalu lintas
3. Program Peningkatan Pelayanan angkutan

Analisis Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja;

Adapun yang mendukung program :

1. Program rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ
2. Program Pengendalian dan Pengamanan lalu lintas
3. Program Peningkatan Pelayanan angkutan

dan kegiatan :

1. Pengadaan Rambu rambu
2. Pengadaan Marka
3. Pengadaan Portal
4. Pengadaan Rambu perlintasan sebidang
5. Pengadaan Guadrail
6. Pengendalian Disiplin pengoperasian angkutan umum di jalan raya
7. Sosialisasi /penyuluhan ketertiban lalu lintas dan angkutan
8. Pemilihan dan pemberian penghargaan sopir/ juru mudi/awak kendaraan angkutan umum teladan.
9. Koordinasi dalam peningkatan pelayanan angkutan
10. Monitoring, evaluasi dan pelaporan
11. Pemeliharaan terminal

Pemeliharaan rambu rambu

Indikator Sasaran 3

3.2 Indeks persepsi pengguna kendaraan pribadi terhadap pelayanan angkutan umum



1. Target kinerja Dinas Perhubungan tahun 2017 sebesar 31 % dan realisasi kinerja tahun 2017 sebesar 31 %, target dan realisasi terpenuhi.

Jika dibandingkan antara target 2016 sebesar 23 persen maka terjadi peningkatan dari tahun 2016 ke 2017 sebesar 8%.

2. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;

Indikator Kinerja	Realisasi 2016	Capaian 2017		
		Target	Realisasi 2017	Persentase
Indeks persepsi pengguna kendaraan pribadi terhadap pelayanan angkutan umum	23	31	31	100

3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi; realisasi telah sesuai dengan renstra dinas perhubungan kabupaten padang pariaman.

Indikator Kinerja	Target	Realisasi 2017	%	2016	2018	2019	2020
Indeks persepsi pengguna kendaraan pribadi terhadap pelayanan angkutan umum	31	31	100	23	39	47	55

4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);

-
5. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;

Penyebab keberhasilan : adanya program dan kegiatan yang mendukung, kegiatan ini merupakan standar pelayanan minimal yang dilaksanakan mulai dari pusat sampai ke daerah.

6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;

Sumber daya manusia

Sarana prasarana	Sumber daya Manusia	Sumber daya Dana
Alat tulis kantor Lap top/ computer Kend Operasioal PP, Perda, Perbup, SK Sarana dan prasarana	PA : Pengguna Anggaran KPA (Kuasa Pengguna Anggaran) PPTK Bendaharawan pengeluaran pembantu Staf (Operator), MC Instruktur peserta	Dana Alokasi Umum (APBD) Rp.

7. Analisis Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja, yaitu program Peningkatan kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor dengan indikator program Angkutan Kendaraan Umum dan barang yang laik jalan.

B. REALISASI ANGGARAN

Akuntabilitas keuangan menyajikan sumber-sumber dana pembangunan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Padang Pariaman menggunakan dana APBD .

Realisasi keuangan Dinas Perhubungan Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2017 seperti tertera pada Tabel dibawah ini :

NO	KEGIATAN		SUMBER DANA	ANGGARAN Rp	REALISASI		CAPAIAN PROGRAM/ KEGIATAN Rp
					Rp	%	
1	2			3	13	14	15
	BELANJA LANGSUNG						
1,01	PROG. PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN		APBD	847.292.455	835.334.310	98,59	Meningkatnya persentase pelayanan administrasi perkantoran
1	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		39.450.967	39.446.000	99,99	Tersedia ATK , cetak dan penggandaan serta pengelolaan surat masuk dan keluar tahun 2017 sebanyak 650 buah surat.
2	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		17.916.488	15.627.910	87,23	Terbayarnya biaya rekening telepon, air dan listrik selama 12 bulan
3	3	Penyediaan Jasa Adm Keuangan		130.000.000	122.618.000	94,3	Pembayaran honorarium KPA, PPK, PPTK, Bendahara Pengeluaran , Bend.Penerima, Pengelola barang , bend gaji , bend pengeluaran pembantu.sebanyak 18 orang .
4	4	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor		33.000.000	32.974.900	99,92	Terpenuhinya kebutuhan jasa pengadaan cleaning service kantor. Selama 12 bulan
5	5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan perundang-Undangan		15.000.000	13.210.000	88,07	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan pada dishub , untuk memenuhi kebutuhan pengadaan surat kabar dan majalah.
6	6	Penyediaan Makanan dan Minuman		25.000.000	24.962.000	99,85	Penyediaan makanan dan minuman dimanfaatkan untuk kebutuhan makanan dan minuman rapat dan tamu dinas.
7	7	Rapat - Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Keluar Daerah		89.160.000	89.140.000	99,98	Kegiatan ini dimanfaatkan untuk rapat rapat koordinasi dalam Kabupaten, Dalam Propinsi

8	8	Penyediaan Jasa Pendukung Perkantoran		451.200.000	451.200.000	100,00	Penyediaan jasa pendukung administrasi perkantoran pada Dishub , dimanfaatkan untuk membayar honor pegawai tidak tetap (PTT) sebanyak 11 orang dan tenaga K2(swakelola) 22 orang .
9	9	Operasional Parkir, Truk, Terminal UPT Wil. I		5.565.000	5.565.000	100,00	Dipergunakan untuk Biaya Operasional pada UPT Wilayah I selama 12 bulan .
10	10	Operasional Parkir, Truk, Terminal UPT Wil. II		41.000.000	40.590.500	99,00	Dipergunakan untuk biaya operasional UPT Wilayah II selama 12 bulan
II		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR		<u>142.500.000</u>	<u>135.133.233</u>	94,83	Persentase sarana dan prasarana yang terpenuhi
11	1	Pengadaan perlengkapan gedung kantor		20.000.000	19.914.815 103.639.417 4.999.000 6.580.000	99,57	Pengadaan perlengkapan gedung kantor di dishub dimanfaatkan untuk pembelian lap top, camera dan printer beserta kelengkapannya.
12	2	Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas / operasional		110.000.000		94,22	Terlaksananya belanja perawatan kendaraan bermotor (biaya service, penggantian suku cadang, bahan bakar minyak , jasa KIR dan belanja STNK) selama 12 bulan
13	3	Pemeliharaan rutin/Berkala Gedung kantor		5.000.000			Pemeliharaan rutin berkala perlengkapan gedung kantor di dishub , dimanfaatkan untuk pemeliharaan gedung kantor, dan pengecatan gedung.
14	4	Pemeliharaan rutin/ berkala perlengkapan gedung kantor		7.500.000		99,98	Pemeliharaan meja,kursi dan pemeliharaan yang lainnya
IV		PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR		<u>19.990.562</u>	<u>19.9750.000</u>	99,92	Persentase SKPD yang mengikuti diklat teknis
15	1	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		19.990.562	19.975.000	99,92	Kegiatan ini dimanfaatkan untuk mengikuti bimbingan teknis yang diadakan baik oleh instansi lain baik dalam dan diluar daerah.
V		PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN		<u>39.750.000,00</u>	<u>39.499.000,00</u>	99,37	Persentase laporan tepat waktu

16	1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi Kinerja SKPD		39.750.000	39.449.000	99,37	Kegiatan ini menghasilkan beberapa dokumen seperti Renstra, Renja, DPA, LAKIP, LLPD, DPAP
VI		PROGRAM PEMBANGUNAN PRASARANA DAN FASILITAS PERHUBUNGAN		<u>12.240.000</u>	7.750.450	<u>63,32</u>	Ketersediaan dokumen perencanaan
17	1	Penyusunan Kebijakan, Norma, Standar dan Prosedur Bidang Perhubungan		5.000.000	1.710.450	<u>31,10</u>	Kegiatan ini dimanfaatkan untuk penyusunan dokumen perhubungan pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika.
18	2	Pendataan & Pemberian Izin Berlayar Pada Kapal GT 7		6.740.000	6.040.000	<u>89,61</u>	Pendataan dan pemberian izin berlayar pada kapal GT 7 di Kabupaten Padang Pariaman menghasilkan data 463 kapal nelayan .
VII		PROGRAM REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN PRASARANA DAN FASILITAS LLAJ		<u>9.186.000</u>	9.186.000	<u>100,00</u>	Pemeliharaan sarana perhubungan
19	3	Pemeliharaan dan perawatan rambu rambu		9.186.000	9.186.000	<u>100,00</u>	Pemeliharaan dan perawatan rambu rambu yang sudah ada yang letaknya tersebar di Kabupaten Padang Pariaman.
VIII		PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN ANGKUTAN		<u>160.601.000</u>	154.184.100	<u>96,00</u>	Angkutan kendaraan umum yang laik jalan
20	1	Uji Kelayakan sarana transportasi guna keselamatan penumpang		27.500.000	27.355.000	<u>99,47</u>	Melaksanakan uji kendaraan yang laik jalan baik kendaraan angkutan umum dan barang , adapun jumlah kendaraan yang wajib uji sebanyak dan kendaraan yang telah diuji 5433 sebanyak kendaraan
21	2	Pengendalian Disiplin pengoperasian angkutan umum di jalan raya.		60.000.000	56.952.100	<u>94,92</u>	Melaksanakan operasi dan memantau angkutan umum di jalan raya dalam mengantisipasi kelaikan kendaraan.
22	3	Sosialisasi /penyuluhan ketertiban lalu lintas dan angkutan		40.000.000	39.540.000	<u>98,85</u>	Mengadakan sosialisasi tentang keselamatan dalam berlalu lintas pada beberapa sekolah
23	4	Pemilihan dan pemberian penghargaan sopir/ juru mudi/awak kendaraan angkutan umum teladan.		18.101.000	18.101.000	<u>100,00</u>	Dilaksanakan pemilihan sopir AKUT dan juara dikirimkan ke tingkat propinsi sumatera barat . di Padang :

24	5	Monitoring, evaluasi dan pelaporan		15.000.000	12.236.000	<u>81,57</u>	Monitoring evaluasi dan pelaporan dimanfaatkan untuk melaporkan kegiatan kegiatan pada bidang darat dan perkeretaapian untuk menjadi dasar dalam pengumpulan data).
X		PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENGAMANAN LALU LINTAS		<u>819.258.500</u>	817.779.000	<u>99,82</u>	Menurunnya angka kecelakaan lalu lintas
25	1	Pengadaan Rambu-Rambu Lalu Lintas		145.000.000	144.712.500	<u>99,80</u>	Pengadaan rambu rambu dimanfaatkan untuk mengurangi resiko kecelakaan yang ada di Padang Pariaman rambu rambu dibuat sebanyak 99 buah termasuk 30 rambu portable..
26	2	Pengadaan marka jalan		149.258.500	149.070.000	<u>99,87</u>	Pengadaan marka jalan dimanfaatkan untuk mengurangi resiko kecelakaan yang ada di Padang Pariaman , marka yang dibuat pada tahun 2017 sepanjang 550 m.,.
27	3	Dukungan Pengamanan Tour de Singkarak		39.000.000	38.998.000	<u>99,99</u>	Dalam pelaksanaan pengamanan tour de singkarak dishub turut serta mengambil peran dalam pelaksanaan tor de singkarak.
28	4	Pengadaan Marka Kaget		136.000.000	135.647.500	<u>99,74</u>	Pengadaan marka kaget dimanfaatkan untuk mengurangi resiko kecelakaan yang ada di Padang Pariaman , marka yang dibuat pada tahun 2017 sepanjang 69,27 m.,.
29	5	Pebuatan rabu rambu penunjuk jalan(RPPJ)		150.000.000	149.772.500	<u>99,85</u>	Pengadaan rambu rambu dimanfaatkan untuk mengurangi resiko kecelakaan yang ada di Padang Pariaman rambu rambu dibuat sebanyak 9 unit.
30	6	Pengadaan rambu rambu perlintasan Sebidang Kereta api		200.000.000	199.578.500	<u>99,79</u>	Pengadaan rambu rambu dimanfaatkan untuk mengurangi resiko kecelakaan yang ada di Padang Pariaman rambu rambu dibuat sebanyak 20 unit.
XI		Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor		<u>103.460.950</u>	103.250.950	<u>99,80</u>	tersedianya unit pengujian kendaraan bermotor. Kend. Yang laik uji 5433 kend

31	1	Pengendalian pengujian kendaraan bermotor		103.460.950	103,250.950	<u>99,80</u>	Dalam pengendalian pengujian kendaraan bermotor dishubkominfo mencetak plat keur dan ssticker samping. Plat uji keur sebanyak 6.500 keping dan cetak sticker samping mobil barang sebanyak 2.750 set.
		JUMLAH		2.154.279.467	2.122.092.042	98,51	

Akuntabilitas keuangan menyajikan sumber-sumber dana pembangunan pada Dinas Perhubungan terbatas pada dana APBD Kab. Padang Pariaman..Realisasi Anggaran Dinas Perhubungan Tahun 2017 disajikan pada lampiran 1. Dimana secara persentase realisasi anggaran belanja langsung dinas perhubungan kominfo sebesar 98,51%

A. Simpulan

Akuntabilitas Kinerja Dinas Perhubungan Kabupaten Padang Pariaman adalah perwujudan kewajiban organisasi untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja. Beberapa hal yang bisa disimpulkan antara lain:

1. Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Padang Pariaman telah dilaksanakan secara optimal melalui peningkatan kinerja di masing-masing bidang yang ada.
1. Capaian kinerja Dinas Perhubungan terhadap target RPJMD yang telah ditetapkan ada yang mencapai target dan ada yang tidak mencapai target, namun mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya.
2. Realisasi indikator kontribusi sektor jasa transportasi terhadap PDRB Padang Pariaman,

B. Langkah ke depan

Dalam upaya untuk meningkatkan kinerja Dinas Perhubungan pada tahun mendatang, beberapa langkah strategis yang akan dilakukan antara lain adalah :

1. Peningkatan keselamatan berlalu lintas melalui pelaksanaan program pengendalian dan pengamanan lalu lintas..
2. Peningkatan kelancaran lalu lintas melalui program pelayanan angkutan
3. Peningkatan pelayanan angkutan umum yang berkualitas melalui program kelaikan pengoperasian kelaikan kendaraan bermotor. .
4. Peningkatan prasarana transportasi yang sesuai standar melalui rehabilitasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana fasilitas LLAJ dan Perhubungan.

Akhir kata, kami beserta segenap aparatur Dinas Perhubungan mengharapkan Laporan Kinerja Dinas Perhubungan Tahun 2017 dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas kinerja dan sebagai sumber informasi penting dalam pengambilan keputusan dan pertanggungjawaban kinerja baik kepada Pemerintah, masyarakat maupun kepada stakeholders yang ada.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Dinas Perhubungan Tahun 2017 yang merupakan gambaran dari keseluruhan program Dinas Perhubungan Tahun 2017.

Semoga Tuhan yang Maha Esa memberkati segala upaya yang kita lakukan dalam mengabdikan bagi kepentingan masyarakat, bangsa dan negara.

Pariaman, Pebruari 2017
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KABUPATEN PADANG PARIAMAN

H. TASLIM SH.MM

Pembina Utama Muda NIP. 19600805 198603 1 004.